Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kevin Pramudya Sejati

Institut Ilmu Kesehatan Strada

Kepinganteng76@gmail.com

Abstrak

Bagi suatu negara yang membina sistem ketatanegaraan sebagai negara hukum, tentunya tidak terlepas dari adanya hukum dalam suatu kehidupan penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara tersebut. Rule of law yaitu konsep nasional yang telah berkembang selama beberapa dekade terakhir.

Hal ini terlihat dengan adanya pertimbangan-pertimbangan terkait konsep negara hukum, yang sudah ada sebelum struktur negara hukum disusun dan diorganisir serta dikembangkan dalam bentuknya yang sekarang.

1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia atau yang biasa di singkat HAM merupakan suatu hak yang di miliki oleh setiap manusia dari lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hakekatnya HAM merupakan sebuah upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum karena hak anara suatu individu berhubungan dengan individu yang lain. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM merupakan suatu kewajiban serta tanggung jawab bersama anantara individu atau masyarakat, pemerintah dan Negara.

Pemahaman terkait hak asasi manusia perlu dilakukan dalam konteks manusia sebagai mahluk sosial, dimana dalam kehidupannya manusia yang satu selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Seseorang baru memahami fungsi dan potensinya sebagai manusia apabila telah berhubungan dengan manusia yang

lain, sehingga manusia selalu hidup berkelompok. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights, bahwa manusia semestinya bergaul dalam suasana persaudaraan, memberi makna bahwa sejatinya manusia yang satu harus menghormati dan menghargai manusia yang lain.

Hak asasi manusia tidak bersifat mutlak, artinya kebebasan dan hak asasi seseorang yang satu akan dibatasi oleh kebebasan dan hak asasi orang lain. Dengan kata lain kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang tidaklah tanpa batas. Apabila tidak ada suatu batasan, maka di dalam suatu masyarakat akan terjadi pertarungan atau persaingan antar individu maupun antar golongan, dimana hanya yang kuat dan yang memiliki pengaruh lah yang akan menjadi pemenang dan akan menikmati hak-haknya secara penuh, sedangkan di sisi yang lain terdapat orang-orang yang hak-haknya tidak terpenuhi dan tidak dapat menikmati hal yang seharusnya menjadi hak mereka.

2. Kasus Masalah

Dari perspektif pengaturan hak asasi manusia, hak asasi manusia punya karakter utama yang membatasi kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintah berwenang untuk membatasi hak-hak utama. Oleh karena itu, meskipun hak-hak utama termasuk sifat membatasi pemerintahan, pembatasan ini pada dasarnya tidak berarti menghentikan pemerintahan, termasuk wewenang untuk mengatur kehidupan bernegara dan masyarakat.

Melalui hal itu, maka pengelolaan kehidupan orang-orang yang secara hukum disebut warga negara tentunya tidak dapat terlepas dari pengaturan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum Indonesia.

3. Tinjauan Pokok

Pada dasarnya harus kita akui bahwa pengertian dari hak asasi manusia telah melahirkan kontroversi di sana-sini tentang pengertian hak asasi manusia. Namun, menurut penulis, bahwa hak asasi manusia bisa dibagi menjadi 2 bagian yaitu, hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan dan hak asasi yang diberikan oleh suatu negara.

4. Pembahasan

Terlihat salah satu hak asasi negara tersebut yaitu hak mereka untuk berdemokrasi dan memiliki kebebasan mereka untuk menjalankan, memenuhi, dan menggunakan hak-hak mereka. Hak ini yaitu bagian yang dapat terbilang penting untuk menuju kebangsaan, karena dapat kita ketahui dengan terus berkembangnya upaya-upaya demokrasi yang terkadang mengarah pada kebebasan demokratisasi.

Adanya salah satu landasan suatu demokrasi adalah asas triaspolitika, dimana dalam triaspolitika ini yang membagi tiga kekuatan politik dalam suatu negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) menjadi tiga bentuk lembaga negara yang berdiri sendiri secara paralel. Koordinasi ketiga bentuk lembaga negara tersebut dibutuhkan supaya ketiga lembaga negara tersebut dapat saling mengawasi serta mengontrol keadaan sesuai dengan adanya prinsip yang berlaku,

Dari ketiga bentuk lembaga negara tersebut adalah lembaga pemerintah yang berwenang menjalankan dan menjalankan kekuasaan eksekutif, badan peradilan yang berperan menjalankan kekuasaan kehakiman, dan kongres rakyat yang berwenang menjalankan kekuasaan legislative.

Keberadaan sistem ini diharapkan bahwa keputusan badan legislatif diharuskan bekerja dan bertindak sesuai dengan keinginan dari masyarakat atau orang-orang (anggota) yang mereka wakili, dan di samping peraturan perundang-undangan, perwakilan yang memilih mereka sebagai bagian darinya. orang. Proses pemilihan umum parlemen.

Tidak hanya dari pemilihan parlemen, ada banyak keputusan atau hasil keputusan, seperti pemilihan presiden nasional, dicapai melalui pemilihan umum.

5. Kesimpulan

Di masa saat ini, hak asasi manusia dipahami sebagai kebebasan yang tidak terbatas, dan ada kesalahpahaman publik tentang kebebasan, yang merupakan inti dari hak asasi manusia tersebut yang memungkinkan masyarakat dalam suatu negara untuk bertindak atas nama hak asasi manusia.

6. Daftar Pustaka

- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sodik, M. A., & Nzilibili, S. M. M. (2017). The Role Of Health Promotion And Family Support With Attitude Of Couples Childbearing Age In Following Family Planning Program In Health. *Journal of Global Research in Public Health*, 2(2), 82-89.
- Sodik, M. A., Suprpto, S. I., & Pangesti, D. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Di Rsui Orpeha Tulungagung. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2(1), 24-32.
- Sodik, M. A., Suprpto, S. I., & Pangesti, D. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Di Rsui Orpeha Tulungagung. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2(1), 24-32.
- Sodik, M. A. (2014). Sikap Pencegahan Aborsi Ditinjau Dari Pengetahuan Tentang Bahaya Dan Resiko Kesehatan. *Strada Jurnal Kesehatan* <http://publikasi.stikesstrada.ac.id/wpcontent/uploads/2015/02/9-SIKAP-SIKAPPENCEGAHAN-ABORSI.pdf>.
- Attoriq, S., & Sodik, M. A. (2018). Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan Di Lahan Praktik.